

# PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM FUNGSI BUDGETING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH

M. Ammar Fahrenza

NPP. 29.0038

*Asdaf Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: ammarfahrenza@gmail.com

## ABSTRACT

**Background (GAP)**, Representative council of Banda Aceh city (DPRK) is a community representative institution within the government, the obligation of DPRK is to accommodate the aspirations of community. One of the functions of the representative institutions is the budget function or budgeting. Members of Banda Aceh city council have do their duties and function properly, due to COVID 19 pandemic, the performance of the council members should be implemented more precisely. The implementation of the budget for handling the COVID 19 has not run optimally, lack of realization, therefore DPRK asked the government to immediately make it happen. **Purpose** of this research is to find out how DPRK budget functions on implementation of the City Revenue and Expenditure Budget, as well as to find out the inhibiting factors of the budget implementation process, and then look for the solutions with the efforts of the DPRK. **Method** This research was conducted qualitatively with data collection technique through interviews, observation, and documentation. **Results** of this research are the DPRK in carrying out its function, namely the budget function has been running well on target, however if we look at the overall implementation of the budget, there are obstacles, one of which is COVID 19 pandemic and also the lack of the human resources at work. The solution is to increase the competence of human resources through development of mastery the tasks and functions as well as the use of technology so that they can easily open up or accept the suggestions from the public with cost free and save time..

**Keywords** : DPRK Role, Budgeting Function, and pandemic covid-19

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP)**, Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang ada didalam pemerintahan, tugas dari DPRK ialah untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat. Salah satu fungsi dari lembaga perwakilan rakyat adalah fungsi anggaran atau budgeting. Anggota Dewan Kota Banda Aceh telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, dikarenakan ada pandemi Covid-19 maka kinerja dewan harus lebih di laksanakan dengan lebih tepat. Pelaksanaan anggaran untuk penanganan Covid-19 belum berjalan dengan maksimal, realisasinya masih kurang, oleh karena itu DPRK meminta pemerintah untuk segera merealisasikannya. **Tujuan** penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi anggaran DPRK terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota, serta untuk mengetahui faktor

penghambat dari proses pelaksanaan anggaran tersebut kemudian mencari solusi dengan upaya-upaya yang dilakukan DPRK. **Metode** penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil temuan** penelitian ini adalah DPRK dalam menjalankan fungsinya yakni fungsi anggaran sudah dikatakan sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran, namun jika dilihat secara menyeluruh pelaksanaan anggaran terdapat hambatan salah satunya adalah adanya pandemi Covid-19 dan juga masih kurangnya SDM dalam bekerja. Solusi yang dijalankan dengan meningkatkan kompetensi SDM dengan pembinaan penguasaan tugas dan fungsi serta pemanfaatan teknologi agar dapat dengan mudah membuka diri atau menerima saran dari masyarakat tanpa harus mengeluarkan biaya dan hemat waktu.

**Kata kunci :** *Peran DPRK, Fungsi Budgeting, dan Pandemi Covid-19*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota dalam penyelenggaraan otonomi sangat penting dikarenakan dengan pengelolaan yang baik dapat menambah kesejahteraan publik dan meningkatkan perekonomian daerah. Provinsi Aceh merupakan wilayah yang diberikan perlakuan khusus dimana pemerintah pusat memberikan wewenang sendiri dalam mengoperasikan dan menata sendiri urusan pemerintahan dan keperluan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara berdasarkan UUD 1945. Proses penyelenggaraan pemerintahan dan mengurus urusan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah Aceh memiliki peraturan perundang-undangan sendiri yang bersifat khusus dengan sebutan “Qanun”. Dalam menjalankan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga yang dipilih oleh masyarakat sehingga harus mampu untuk memenuhi semua aspirasi-aspirasi masyarakat, sehingga tuntutan masyarakat akan kepentingan luas dapat terwakilkan dan direalisasikan. Peranan anggaran merupakan salah satu fungsi yang cukup penting dan berdampak luas dalam pelaksanaan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBK). Kondisi ini sangat bersinggungan dengan peran wajib kepala daerah dalam tanggungjawab atas pelaksanaan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Indikator untuk mendapatkan kinerja yang baik adalah dengan menguatkan sumber daya manusia yang bermutu dan memiliki skil, dengan cara meningkatkan mutu pendidikan, ditambah lagi saat-saat ini pemerintah dikhawatirkan dengan adanya penyakit pandemi yang menyebabkan munculnya permasalahan ekonomi suatu daerah. Sebelumnya seperti yang diketahui bahwa anggaran yang digunakan untuk mengatasi Covid-19 baru terealisasikan sebesar 8% dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Kota Banda Aceh. Oleh karenanya Dewan Perwakilan Rakyat Kota meminta agar Pemerintah kota segera merealisasikan dana untuk penanganan Covid-19. Dikutip dari [dprk.bandacehkota.go.id](http://dprk.bandacehkota.go.id), Selasa, 24 Agustus 2021.

**TABEL 1.1**  
**APBD dan Realisasi APBD di Kota Banda Aceh**

<b>Akun</b>	<b>Tahun</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>	<b>Prosentase (%)</b>
<b>Pendapatan</b>	2017	1.247.693.437.876	1.244.415.059.119	112,37%
<b>Belanja</b>	2017	1.248.393.437.876	1.225.243.124.297	98,15 %
<b>Pendapatan</b>	2018	1.210.549.597.835	1.135.914.599.522	93,83%
<b>Belanja</b>	2018	1.213.749.597.835	1.173.868.935.019	96,71%
<b>Pendapatan</b>	2019	1.293.142.495.148	1.215.834.088.160	94,02%
<b>Belanja</b>	2019	1.315.342.495.148	1.230.049.045.899	93,52%
<b>Pendapatan</b>	2020	1.303.472.173.205	1.258.996.719.879	96,59%
<b>Belanja</b>	2020	1.237.652.961.908	1.146.484.210.994	92,63%

Sumber <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>, 2021

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa dimana pemerintah sudah berusaha keras dalam merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK). Pemberian Otonomi Daerah memberikan keleluasaan dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dalam melaksanakan penataan keuangan daerah. Pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota sangat penting untuk tercapainya aspirasi-aspirasi masyarakat dan memberikan dampak yang baik terhadap mengurangi angka Covid-19 yang merupakan perkara yang bisa dikatakan amat serius karena menyebabkan berbagai impresi buruk bagi perekonomian negara terkhususnya daerah Kota Banda Aceh. Efektifnya peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota akan mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparansi, sehingga menjadikan Lembaga Perwakilan Rakyat yang terpercaya, kreatif, dan proaktif.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Ada beberapa permasalahan yang terjadi, yang menjadi poinnya adalah peran dari DPRK dalam melaksanakan penataan keuangan daerah. Pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota peran Dewan Perwakilan Rakyat Kota sangat penting untuk tercapainya aspirasi-aspirasi masyarakat peran fungsi budgeting sangat berpengaruh dalam terlaksananya pengelolaan anggaran yang efektif dan output yang dihasilkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota itu sendiri adalah ketepatan dari anggaran itu sendiri. Berdasarkan paparan diatas penulis ingin melakukan

penelitian terkhusus berkaitan apa saja fungsi budgeting dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Banda Aceh. Selain itu penulis juga ingin mengetahui apakah pelaksanaan fungsi anggaran atau budgeting Dewan Perwakilan Rakyat Kota sudah berjalan dengan efektif ditambah dengan adanya realokasi anggaran dan refocusing terhadap penyelesaian penyebaran Covid-19 di Kota Banda Aceh. Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk meneliti tentang kinerja keuangan pemerintah dengan judul **“PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM FUNGSI BUDGETING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDA ACEH”**.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh kinerja dewan dalam menjalankan fungsi anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Rendy Jayana Syahputra, Muhammad Jamal Amin, dan Anwar Alaydrus berjudul Efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur. Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor pendukung dan penghambat dari tercapainya fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana hasilnya yaitu, Faktor penunjang utama dan kendala dalam hal pengembangan dan efektivitas Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Kutai Timur adalah masalah kejelasan biaya dan pembenahan dana anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Avitta Karunia Dewi, dan Risma Wira Bharata berjudul Tugas Dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan Fungsi Anggaran Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, Studi ini berpendapat bahwa tugas dan wewenang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sangat penting dalam kelancaran proses pelaksanaan fungsi anggaran terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menggunakan metode yang sama yakni dengan metode deskriptif yang diperoleh dari hasil kegiatan pengamatan dan wawancara terhadap orang yang bersangkutan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian terakhir adalah dilakukan oleh Teuku Raja Muda berjudul PERAN DAN FUNGSI DPRA DALAM PEMBAHASAN RAPBA TAHUN 2018. Dalam penelitian ini faktor penghambat dari tidak efektifnya kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sama-sama dipengaruhi oleh kurangnya data-data dan kurangnya komunikasi antar fraksi-fraksi yang lebih mementingkan keperluan pribadi atau partai politiknya, Penelitian ini lebih membahas tentang keterlambatan pengesahan APBA, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan bertujuan untuk melihat kinerja dari fungsi DPRK atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Penulis menggunakan konsep teori peran yang akan dilakukan pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya, teori tersebut dikemukakan oleh Miftah Thoha dalam bukunya Kepemimpinan Dalam Manajemen. Perbedaan lainnya adalah penulis lebih fokus meneliti peran DPRK dalam menjalankan fungsinya terkhusus fungsi anggaran.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi budgeting dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota terhadap implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) di Kota Banda Aceh dan faktor yang menghambat kinerja DPRK serta untuk mengatasi masalah tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan metode dalam pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang dipakai peneliti untuk memperoleh data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data Primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 10 orang informan yang terdiri dari Ketua DPRK kota Banda Aceh, Sekretaris DPRK Kota Banda Aceh, Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan, Komisi I,II,III, dan IV, dan terakhir adalah masyarakat. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2018-2020, laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun anggaran 2018-2020, dokumentasi foto kegiatan di lapangan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah. Data lainnya juga diperoleh dari LKJIP Sekretariat DPRK Banda Aceh tahun 2020. Teknis analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dari semuanya

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai kinerja dan peran dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota terhadap salah satu fungsi DPRK kota Banda Aceh yaitu fungsi budgeting. dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miftah Thoha. Teori tersebut terdiri dari 3 cara peran pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Fungsi Budgeting Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota (APBK) Di Kota Banda Aceh**

DPRK Kota Banda Aceh mewujudkan lembaga perwakilan rakyat yang ada didalam pemerintahan, tugas dari DPRK ialah untuk menampung aspirasi-aspirasi masyarakat, selanjutnya aspirasi – aspirasi tersebut diolah menjadi suatu peraturan daerah atau disebut juga Qanun, Qanun ialah salah satu bentuk regulasi hukum khusus berlaku di Provinsi Aceh, sehingga DPRK mempunyai hak inisiatif dalam menjalankan perannya untuk membentuk Qanun yang berkualitas dan dapat membawa kesejahteraan dimasyarakat. Anggota DPRK Kota Banda Aceh harus lebih sering untuk terjun langsung ke masyarakat dengan melaksanakan evaluasi, proses evaluasi ini bertujuan untuk menyerap aspirasi serta memberikan bukti pertanggungjawaban secara moral. Proses penganggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota harus ditetapkan beralaskan prioritas utama kepentingan pemerintah, memastikan dan memantau bahwa program dan pelaksanaan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan tepat waktu dan dialihkan dengan cara terbaik. DPRK selaku lembaga wakil rakyat di daerah memegang peran yang besar dalam sistem demokrasi, berkaitan erat dengan otonomi daerah, Tujuan utama dari fungsi anggaran ini adalah meyakinkan bahwa walikota telah merangkai APBD dengan tepat sesuai keperluan daerah tanpa adanya upaya melebih-lebihkan dan mengurangi keperluan atas keuangan daerah tersebut.

### **3.2. Faktor-Faktor Penghambat Kinerja Fungsi Budgeting Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota**

Indikator untuk mengukur kualitas seseorang biasanya dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimilikinya, walaupun bukan hasil yang pasti tetapi secara umum makin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin berkualitas dan terdidik orang tersebut. Permasalahan dari kualitas sumber daya manusia mencakup dengan pengalaman, penguasaan akan tanggung jawab, dan latar belakang pendidikan yang dimiliki anggota DPRK Banda Aceh, latar belakang pendidikan

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kemampuan dan kapabilitas dari anggota dewan kota Banda Aceh. Kemampuan dan pengalaman anggota dewan tersebut secara pribadi akan mempengaruhi kinerja dari DPRK Banda Aceh, Sumber daya manusia bagi anggota DPRK Banda Aceh memiliki pengaruh yang besar, tingkat pendidikan serta pengalaman dari anggota dewan ini bermacam-macam, sehingga sangat berpengaruh dalam proses penyusunan anggaran terkhusus mereka yang berada di bagian anggaran. Sumber daya yang paling penting untuk DPRK Banda Aceh untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya adalah jumlah anggota DPRK Banda Aceh itu sendiri. Sumber Daya Manusia penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi juga dikoordinasikan oleh sekretariat DPRK Banda Aceh, dimana sebagai lembaga penunjang DPRK, sekretariat memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan dukungan bagi pelaksanaan fungsi anggaran DPRK Banda Aceh. Penetapan tingkat kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen langsung dari seorang pimpinan suatu organisasi yang sangat tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang baik serta terukur dalam jangka waktu satu tahun tertentu dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya. Tujuan adanya pembatasan kinerja tidak lain hanya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kapasitas aparatur negara sebagai bentuk dari janji dan tanggungjawab dari masyarakat. Dengan adanya penghargaan dan sanksi dari pemerintah bisa mendorong para anggota dewan dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan bidang mereka masing-masing dengan begitu tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. Selain hal di atas ada satu faktor yang sangat berdampak besar bagi kinerja dewan yaitu adanya pandemi covid-19 yang melanda di dunia. Pandemi covid-19 ini merupakan permasalahan besar yang sangat berdampak terhadap seluruh bagian yang ada di suatu pemerintahan terkhusus pada bagian anggaran, dimana banyak terjadinya perubahan-perubahan anggaran yang sebelumnya ingin digunakan untuk suatu kepentingan ternyata tidak jadi digunakan untuk kepentingan tersebut, melainkan digunakan untuk penanganan pandemi covid-19. Dengan adanya pandemi ini sangat meresahkan masyarakat terkhusus kepada pemerintah dalam hal ini lebih ditujukan kepada para anggota dewan agar dapat mengatasi masalah yang diakibatkan oleh covid-19, pandemi ini akan sangat berdampak buruk bagi pertumbuhan perekonomian apabila kita sebagai masyarakat dan pemerintah bersama-sama mengatasi penanganan pandemi Covid-19.

### **3.3. Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Kota Banda Aceh**

DPRK Banda Aceh ialah lembaga politik yang memiliki anggota berasal dari beragam pengalaman dan pemahaman akan pendidikan yang berbeda sehingga akan memiliki pengaruh terhadap kemampuan anggota DPRK Banda Aceh dalam menghasilkan anggaran yang berkualitas secara materi dan muatannya agar dapat berjalan dengan baik tersebut dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Berdasarkan hasil pengamatan penulis selama melaksanakan penelitian di kantor sekretariat DPRK Banda Aceh perlu adanya peningkatan sumber daya manusia di DPRK Banda Aceh, peningkatan itu dapat dilakukan dengan pemberian seminar, diklat, pelatihan, studi banding, dan juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Kompetensi yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kemampuan, kecakapan, keahlian dan pengetahuan dari anggota DPRK Banda Aceh berdasarkan masing – masing bidang yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari anggota DPRK Banda Aceh, cara tepat untuk mendorong dan meningkatkan sumber daya di DPRK Banda Aceh salah satunya ialah menganjurkan para anggota dewan dengan dukungan dan kesempatan belajar bagi anggota dewan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dengan memberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, mengikutsertakan para anggota DPRK kota Banda Aceh kedalam seminar atau pelatihan yang berkaitan terhadap tugas

dan fungsi DPRK Banda Aceh dan terakhir dapat dilaksanakan pendidikan atau diklat kepada anggota DPRK Banda Aceh yang juga berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan. Upaya – upaya yang dilakukan tidak akan berarti tanpa kemauan dari anggota DPR Aceh untuk mengembangkan diri dan bergerak maju. Upaya tersebut bertujuan menciptakan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya tugas anggota DPRK Banda Aceh agar dapat memenuhi semua aspirasi masyarakat dan membawa kesejahteraan. Upaya lain untuk meningkatkan kinerja anggota dewan adalah dengan memanfaatkan teknologi di zaman sekarang yang mempermudah dalam mengatasi masalah. perkembangan teknologi informasi berkembang dengan pesat, setiap orang terhubung dengan orang lain secara online dan informasi apapun berkembang dengan pesat tanpa bisa dibendung, pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan sarana sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja kota maupun pemberitaan terkait hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota sehingga dapat menciptakan transparansi kepada masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab dari anggota DPRK Banda Aceh. Media massa dapat menjadi sarana untuk membentuk opini masyarakat terkait DPRK Banda Aceh, sehingga DPRK Banda Aceh dapat membangun citra positif kepada masyarakat, hal ini diharapkan memotivasi anggota dewan untuk dapat lebih bekerja dengan memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Dengan adanya teknologi dapat membantu terwujudnya tata kelola kedewanan yang inovatif, cepat, murah, dan taktis. Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan sudah lama diterapkan pada negara – negara maju, mulai dari tahap persiapan naskah rancangan peraturan perundang-undangan hingga tahap pembahasan di lembaga legislatifnya sehingga proses ini diharapkan dapat mengurangi dan mengantisipasi peraturan perundang-undangan yang kontroversial masyarakat, didalam undang – undang otonomi khusus Aceh, mengamanatkan bahwasanya perlu transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan partisipasi masyarakat, tetapi qanun tersebut belum terbentuk sampai sekarang. Dalam tata tertib DPRK Banda Aceh disebutkan bahwa rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran, rapat badan legislasi dan rapat badan kehormatan bersifat tertutup kecuali ada arahan dari pimpinan rapat bahwasanya rapat tersebut dibuka untuk masyarakat, jadi dengan ketentuan tersebut otomatis rapat yang dilakukan DPRK Banda Aceh bersifat tertutup kecuali pertimbangan khusus dari anggota DPRK Banda Aceh seharusnya DPRK Banda Aceh dapat lebih terbuka kepada masyarakat dalam setiap pembuatan rancangan Qanun hingga menjadi qanun karena negara kita ialah negara demokrasi dan juga rakyat dapat mengawasi dan mengawal secara langsung proses pembentukan qanun demi terciptanya qanun yang berkualitas.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa kinerja dari sewan perwakilan rakyat kota (DPRK) Kota Banda Aceh sudah sangat baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya atau dengan daerah lain yang ada di provinsi Aceh. DPRK Kota Banda Aceh lebih transparan dan lebih unggul di berbagai bidang namun tetap saja di dalam suatu organisasi masih ada yang belum terlaksana dengan baik, sehingga mengharuskan anggota dewan bekerja lebih aktif dan baik lagi agar dapat memuaskan masyarakat. Terkhusus temuan yang didapati penulis pada fungsi anggaran, DPRK seharusnya bekerja sama dengan pemerintah kota agar dapat merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) dengan baik dan tepat karena output dari fungsi anggaran DPRK itu sendiri adalah terlaksananya APBK dengan sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Jika dilihat dari tahun ke tahun peran dari DPRK terkhusus pada fungsi anggaran bisa dikatakan sudah sangat baik karena dapat menjalankan APBK dengan realisasi diatas 90% dan juga dilihat dari sisi lain peran DPRK lebih terlihat dimana ketua DPRK Kota Banda Aceh sangat aktif di bidang sosial. DPRK sering terjun

langsung ke lapangan apabila masyarakat tertimpa musibah seperti kebakaran atau lainnya sehingga peran DPRK sangat membantu masyarakat.

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa peran dan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam bidang fungsi anggaran sudah baik jika dilihat dari tahun sebelumnya, anggota dewan sudah lebih aktif dan juga dibantu oleh para staf dari sekretariat dewan, dimana tahun ini hasil dari pembuatan qanun di Kota Banda Aceh lebih banyak yang telah jadi aturan sehingga dapat dikatakan peran dari DPRK sudah baik, namun tetap saja harus ada perbaikan di bidang lainnya yang masih kurang. DPRK harus lebih aktif lagi dan membuka diri kepada masyarakat agar dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya dan juga banyaknya anggota dewan yang sedang melaksanakan dinas luar sehingga ada beberapa anggota dewan yang dijadikan sebagai informan harus diwawancarai melalui virtual dan mengganti informan lain.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peran dan kinerja dewan pada fungsi-fungsi lainnya pada tahun yang akan datang untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh beserta jajarannya dan kepada sekretariat dewan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### VI. DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, 2012. *Aspek Hukum Pengadaan Barang & jasa dan Berbagai Permasalahannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Danim, Sudarwan, 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Rineka Cipta.

Hamdi, Asep Saepul, dan E, Baharuddin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.

Miftah, Thoha. 2012. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sajipto, Rahardjo. dan Boedianto. 2009 *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD)*, Fokus Media.

Sugiyono. 2012. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syahputra, R., Amin, M., & Alaydrus, A. (2017). *EFEKTIVITAS KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUTAI TIMUR*. 6(2), 2477–2631.  
<https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/>

Avitta Karunia Dewi, & Risma Wira Bharata. (2021). TUGAS DAN WEWENANG DPRD DALAM PELAKSANAAN FUNGSI ANGGARAN TERHADAP ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) PROVINSI JAWA TENGAH. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan Dan Akuntansi)*

*PERAN DAN FUNGSI DPRA DALAM PEMBAHASAN RAPBA (Studi Kasus Tentang Keterlambatan Pengesahan APBA Pada Tahun 2018)*. (n.d.). Retrieved September 15, 2021, <https://repository.ar-raniry.ac.id>

LKJIP Sekretariat DPRK Banda Aceh.

<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/BAKN>. Selasa, 24 Agustus 2021

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. *APBD dan Realisasi APBD di Kota Banda Aceh*. Selasa, 24 Agustus 2021.

